

**TANTANGAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA
BIMA**
*CHALLENGES OF FIRST-TIME VOTER PARTICIPATION IN THE 2024
SIMULTANEOUS ELECTIONS IN BIMA CITY*

Nabil Fajaruddin, Taufik Firmanto dan Aman Ma'ri

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : nabil.brandal@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fajaruddin, Nabil, Taufik Firmanto dan Aman Ma'ri. *Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima, yang menjadi kelompok strategis dalam menentukan arah politik bangsa. Berdasarkan pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis, ditemukan bahwa keterlibatan pemilih pemula masih dipengaruhi oleh minimnya pendidikan politik, faktor keluarga, dan pengaruh media sosial. Studi ini menyarankan perlunya penguatan pendidikan politik dan peran aktif institusi pendidikan serta KPU daerah. Kota Bima dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah pemilih pemula yang signifikan dan dinamika politik lokal yang cukup kompleks, sehingga representatif untuk menggambarkan kondisi partisipasi politik generasi muda.

Kata Kunci: Kota Bima, Pendidikan Politik, Pemilih Pemula, Pemilu Serentak, Partisipasi Politik

ABSTRACT

This study examines the level of participation of first-time voters in the 2024 Simultaneous Elections in Bima City, a strategic group in determining the nation's political direction. Based on legal, sociological, and philosophical approaches, it was found that first-time voter involvement is still influenced by a lack of political education, family factors, and the influence of social media. This study suggests the need to strengthen political education and the active role of educational institutions and the regional General Elections Commission (KPU). Bima City was chosen as the research location because it has a significant number of first-time voters and quite complex local political dynamics, making it representative in describing the political participation of the younger generation.

Keywords: Bima City, First-Time Voters, Political Education, Political Participation, Simultaneous Election

A. PENDAHULUAN

Pemilu Serentak 2024 ialah momen penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Salah satu aktor kunci pada perhelatan itu ialah pemilih pemula, yakni warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya karena baru mencapai usia 17 tahun atau sudah/pernah menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di Kota Bima, keberadaan pemilih pemula menjadi perhatian mengingat jumlahnya cukup signifikan dan memiliki potensi besar dalam menentukan hasil pemilu.¹ Secara filosofis, keberadaan pemilih pemula mencerminkan prinsip partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.²

Pemilih pemula sebagai generasi baru memiliki idealisme yang tinggi, namun kerap minim pengalaman dan pemahaman politik, sehingga dapat menjadi sasaran pengaruh politik praktis yang kurang sehat.³ Secara yuridis, hak memilih merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3).⁴ Perlindungan hukum atas hak pilih ini menjadi penting untuk memastikan setiap warga, termasuk pemilih pemula, dapat berpartisipasi secara bebas, jujur, dan adil.⁵

Secara sosiologis, partisipasi politik pemilih pemula di Kota Bima dipengaruhi oleh faktor pendidikan, lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta akses informasi melalui media sosial.⁶ Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala seperti rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pemilu, rendahnya literasi politik, serta maraknya hoaks yang beredar menjelang hari pencoblosan.⁷

¹ I. Kelibay dkk., *Sosialisasi Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula (Siswa/Siswi SMA Kelas XII) di Kota Sorong pada Pemilu Serentak Tahun 2024*, Abdi Insani, Vol.10, No.2 (2023).

² Riska Wulandari dan Eko Setyadi Kurniawan, *Edukasi Bagi Pemilih Pemula Sebagai Upaya Partisipasi Masyarakat dalam Gelaran Pemilu Tahun 2024*, Jurnal Gerakan Mengabdikan Untuk Negeri, Vol.2, No.2 (2024).

³ Ananda Yayang Praduta dan Meltarini Meltarini, *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*, Skripsi, IPDN, Kalimantan, 2024.

⁴ Siti Murfatiah dan Delly Maulana, *Kualitas Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024 di Kota Serang*, Moderat, Vol.11, No.2 (2025).

⁵ Junedi Singarimbun dan Ridwan Nasution, *Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Deliserdang*, Jurnal Riset Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2025).

⁶ Ariandi A Zulkarnain dkk., *Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Journal of Governance Innovation, Vol.5, No.1 (2023).

⁷ Nuning Indah Pratiwi dkk., *Sosialisasi Penggunaan Komunikasi Efektif untuk Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh*, BERNAS, Vol.5, No.2 (2024).

Pemilihan Kota Bima sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, secara demografis, Kota Bima memiliki jumlah pemilih pemula yang cukup signifikan dalam komposisi daftar pemilih tetap pada Pemilu Serentak 2024, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai keterlibatan politik generasi muda. Kedua, dinamika politik di Kota Bima relatif kompleks, ditandai dengan tingkat kompetisi politik yang tinggi serta adanya pengaruh kuat faktor kultural, sosial, dan media digital terhadap perilaku memilih. Ketiga, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula di wilayah ini, cenderung fluktuatif, sehingga menarik untuk diteliti lebih dalam dalam konteks Pemilu Serentak 2024.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini ingin mengkaji bagaimana tingkat dan bentuk partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Serentak 2024 di Kota Bima, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif dan kritis dari segmen pemilih ini.⁸ Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima, Apa saja faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih pemula dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan partisipasi mereka.

B. PEMBAHASAN

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, termasuk di Negara Indonesia.⁹ Khususnya dalam perhelatan Pemilu Serentak Tahun 2024, partisipasi ini menjadi sorotan karena pemilu kali ini mencakup pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan, yang membutuhkan tingkat kesadaran politik masyarakat yang lebih tinggi.¹⁰ Pemilih pemula memegang peranan strategis. Mereka tidak hanya merupakan pemilik suara baru, tetapi juga representasi dari masa depan demokrasi Indonesia.

⁸ Azkiyah Rahmita Fauziah dkk., *Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital*, Jurnal Kajian Konstitusi, Vol.3, No.1 (2023).

⁹ Nasir Mangngasing dkk., *Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kecamatan Sarjo*, Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS), Vol.2, No.2 (2023).

¹⁰ Saepudin Muhtar dkk., *Peran Penting Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024*, Devosi, Vol.4, No.2 (2023).

Penelitian ini berfokus pada partisipasi pemilih pemula di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang khas.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2024 sebanyak 111.356 pemilih, yang terdiri dari 54.744 laki-laki dan 56.612 perempuan. Dari jumlah tersebut, pemilih pemula diperkirakan mencapai ± 6.000 orang atau sekitar 5,4% dari total DPT. Mereka umumnya merupakan pelajar SMA/SMK kelas akhir dan mahasiswa semester awal yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara dengan anggota KPU Kota Bima, guru PPKn di beberapa SMA/SMK, serta para pemilih pemula sendiri. Hasil lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih pemula di Kota Bima menggunakan hak pilihnya, tetapi belum memahami secara komprehensif proses pemilu, mekanisme pencoblosan, maupun pentingnya rasionalitas dalam memilih calon legislatif atau eksekutif.

Terdapat pula kecenderungan pemilih pemula untuk memilih berdasarkan pengaruh keluarga, teman sebaya, atau tren media sosial, bukan karena pemahaman visi, misi, dan rekam jejak calon. Temuan menarik lainnya adalah bahwa meskipun KPU Kota Bima telah melaksanakan program “KPU Goes to School” dan melibatkan Relawan Demokrasi, penyebaran edukasi pemilu masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu. Beberapa sekolah bahkan belum pernah menerima sosialisasi langsung dari penyelenggara pemilu. Sebaliknya, para guru PPKn mengakui bahwa kurikulum belum memberi ruang cukup untuk mendalami pendidikan pemilu secara aplikatif. Berdasarkan realitas tersebut, pembahasan selanjutnya akan dibagi dalam dua sub bagian utama: pertama, mengkaji pengaturan partisipasi pemilih secara normatif dalam Pemilu Serentak 2024 di tingkat nasional; kedua, menganalisis tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Bima serta faktor-faktor yang memengaruhinya dari sisi empiris.

1. Pengaturan Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Indonesia

Partisipasi pemilih merupakan aspek fundamental dalam pemilu yang demokratis. Pemilu tidak hanya merupakan proses prosedural untuk memilih

wakil rakyat dan pemimpin eksekutif, tetapi juga merupakan mekanisme partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara.¹¹ Di Indonesia, pengaturan partisipasi pemilih secara hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.¹² Dasar hukum utama yang mengatur pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 35 UU Pemilu menyebutkan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah/ pernah kawin, dan memiliki hak memilih.

Dalam kaitannya dengan partisipasi, UU ini menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), serta menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam memilih dan dipilih.¹³ Secara teknis, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu diberi kewenangan untuk menyusun daftar pemilih, melaksanakan pendidikan pemilih, dan memfasilitasi keterlibatan seluruh segmen masyarakat dalam proses pemilu, termasuk pemilih pemula. Dalam Pasal 14 huruf h UU Pemilu, disebutkan bahwa KPU bertugas memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Pendidikan pemilih ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi, agar tidak sekadar hadir ke TPS, tetapi mampu memilih secara rasional dan bertanggung jawab.

Pada Pemilu Serentak 2024, KPU menerapkan berbagai program strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih, antara lain:

1. Pendidikan Pemilih Berbasis Segmen melalui kegiatan seperti KPU Goes to School, KPU Goes to Campus, dan penguatan Relawan.
2. Demokrasi, pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui integrasi dengan data Dukcapil untuk menjamin pemilih pemula terdaftar tepat waktu Pemanfaatan Teknologi Informasi, seperti aplikasi cek DPT online, media sosial, dan sistem informasi pemilu digital yang memungkinkan akses informasi lebih mudah bagi generasi muda.

¹¹ Loho dkk., *Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Palangka Raya tentang Pentingnya Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Presiden 2024*, JPIPS, Vol.15 (2023).

¹² Riyan Jaelani, *Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi, IPDN, Kalimantan, 2024.

¹³ Taufiqurrohman Syahuri, Syamsul Hadi dan Gilang Abi Zaifa, *Peningkatan Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula Pelajar SMAN 34 Jakarta pada Pemilu Serentak 2024*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa, Vol.6, No.2 (2023).

3. Kampanye Partisipatif, yang menekankan peran serta masyarakat, tokoh pemuda, dan lembaga pendidikan dalam mengajak pemilih aktif menggunakan hak suaranya.

Namun demikian, pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan implementatif. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara regulasi dengan kondisi lapangan, terutama dalam menjangkau pemilih pemula di daerah pinggiran, pedesaan, atau sekolah yang tidak tersentuh program sosialisasi secara langsung.¹⁴ Di sinilah letak pentingnya sinergi antara KPU, sekolah, keluarga, dan masyarakat sipil dalam mendorong partisipasi politik sejak dini. Selain itu, literasi politik pemilih pemula cenderung rendah, karena keterbatasan pemahaman terhadap sistem politik, lembaga-lembaga negara, serta peran strategis pemilu dalam kehidupan berbangsa. Hal ini perlu direspons dengan penguatan pendidikan politik secara sistemik, baik melalui jalur formal (sekolah) maupun nonformal (komunitas dan media sosial). Tanpa itu, regulasi yang ada berpotensi menjadi formalitas tanpa substansi. Dengan demikian, pengaturan partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sistem yang relatif baik, namun perlu penguatan dalam tataran implementasi, khususnya pada segmen pemilih pemula.

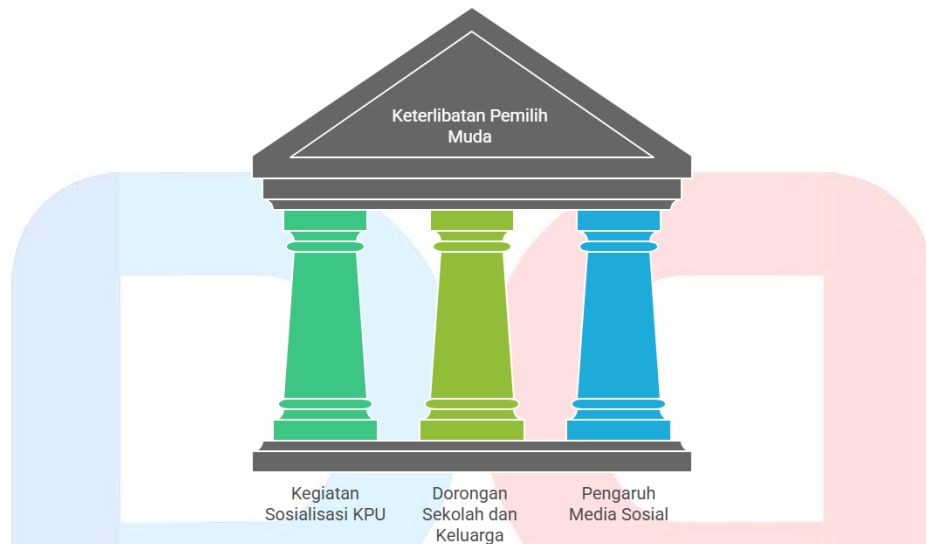
2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Bima, ditemukan bahwa partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi secara kuantitatif, namun secara kualitatif masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti kurangnya pemahaman politik, dominasi pengaruh sosial media, serta partisipasi yang bersifat simbolik atau ikut-ikutan.¹⁵ Dari data yang dihimpun melalui wawancara dengan petugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, serta pengamatan langsung di sejumlah TPS dan institusi pendidikan, diketahui bahwa jumlah pemilih pemula (usia 17–21 tahun) di Kota Bima mencapai sekitar 7.842 orang dari total 110.526 daftar pemilih tetap (DPT) Kota Bima. Ini berarti kelompok pemula menyumbang sekitar 7% dari keseluruhan pemilih di kota ini.

¹⁴ I Made Sudiksa dkk., *Edukasi Penggunaan Media Sosial bagi Pemilih Pemula Sebagai Sarana Kampanye Pemilu Serentak 2024 di Desa Sumerta Kelod*, Sewagati, Vol.3, No.1 (2024).

¹⁵ K.F. Dantes dkk., *Sosialisasi dan Simulasi Partisipasi Pemilih Pemula di SMAN 2 Singaraja Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024*, Proceeding Senadimas Undiksha 1588 (2022).

Adapun data keikutsertaan pemilih pemula yang diperoleh dari KPU Kota Bima menunjukkan bahwa lebih dari 75% dari pemilih pemula hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Angka ini secara kuantitatif menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terutama karena didorong oleh beberapa faktor, antara lain:



Gambar 1. Faktor Pendukung Peningkatan

Sumber: Kreasi Penulis

Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima secara kuantitatif menunjukkan angka yang cukup menggembarakan. Sebagian besar dari mereka tercatat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, partisipasi ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi politik yang substansial. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 15 responden pemilih pemula dari tiga kecamatan yang berbeda di Kota Bima, ditemukan bahwa sebagian besar di antara mereka belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai proses demokrasi elektoral yang mereka ikuti. Banyak pemilih pemula yang memilih calon hanya berdasarkan popularitas semu, seperti penampilan fisik calon atau viralitas mereka di media sosial, tanpa memperhatikan visi-misi, program kerja, ataupun rekam jejak politik calon tersebut.

Alasan memilih cenderung dipengaruhi oleh ajakan teman sebaya atau keluarga, daripada didasarkan pada pertimbangan rasional dan kritis. Bahkan, sebagian besar responden mengaku tidak dapat membedakan secara jelas antara pemilu legislatif dan eksekutif, yang pada dasarnya memiliki fungsi dan peran institusional yang berbeda dalam struktur pemerintahan. Dalam aspek konsumsi informasi politik, mayoritas responden juga tidak mengikuti proses kampanye secara mendalam. Mereka hanya mengenal nama-nama calon dari baliho yang tersebar di ruang publik atau dari konten singkat di media sosial seperti TikTok dan Instagram, tanpa mengevaluasi substansi pesan kampanye.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka lebih bersifat ritualistik, yakni hadir dan berpartisipasi karena merasa memiliki kewajiban sebagai warga negara atau sekadar ikut arus lingkungan sosialnya, tetapi tidak disertai kesadaran kritis terhadap hakikat pemilu sebagai sarana artikulasi kehendak rakyat. Minimnya kualitas partisipasi ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pendidikan politik yang diterima pemilih pemula, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Hasil wawancara dengan beberapa guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di dua SMA negeri menunjukkan bahwa pembahasan tentang pemilu hanya dilakukan secara umum dan sekilas, bahkan kerap kali tidak menjadi bagian utama dalam pembelajaran. Kurikulum yang ada belum mengakomodasi secara utuh materi yang mendorong literasi politik siswa secara praktis. Para guru pun mengakui adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menyampaikan pendidikan politik yang kontekstual dan aplikatif menjelang pemilu.

Lebih jauh lagi, pendekatan formal yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dalam menyosialisasikan pemilu juga dinilai kurang efektif untuk menjangkau generasi muda. Sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka dengan format ceramah konvensional tidak selalu menarik minat pemilih pemula, yang notabene merupakan bagian dari generasi Z yang tumbuh dalam kultur digital dan visual. Bahasa komunikasi yang digunakan pun masih cenderung kaku dan belum menyesuaikan dengan gaya komunikasi remaja saat ini yang lebih interaktif dan visual, sehingga pesan-pesan demokrasi yang disampaikan tidak maksimal diterima oleh sasaran utama.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa praktik baik (best practices) dalam mendorong partisipasi pemilih pemula yang dapat menjadi inspirasi untuk penguatan strategi ke depan. Salah satunya adalah kolaborasi antara KPU Kota Bima dengan organisasi intra-sekolah (OSIS) untuk mengadakan simulasi pemungutan suara di sekolah-sekolah, yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses pemilu. Selain itu, keberadaan Komunitas Pelajar Demokratis yang digagas oleh sekelompok siswa aktif juga memainkan peran penting dalam penyebaran konten pendidikan politik melalui platform digital secara mandiri dan kreatif.¹⁶ Tidak sedikit pula dari kalangan pemilih pemula yang terlibat langsung sebagai relawan pemilu maupun saksi partai, yang memberikan mereka pengalaman langsung tentang dinamika penyelenggaraan pemilu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Serentak 2024 di Kota Bima cukup menjanjikan dari sisi kuantitas, namun masih membutuhkan penguatan dalam hal kualitas. Untuk membentuk pemilih pemula yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab secara politik, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif, baik dari KPU maupun institusi pendidikan. Pendekatan sosialisasi pemilu harus dirancang lebih kreatif dan komunikatif agar relevan dengan karakter generasi muda saat ini.¹⁷ Di sisi lain, sekolah sebagai institusi formal pendidikan harus mampu menjalankan peran strategis dalam membentuk literasi demokrasi sejak dini, sehingga pemilu benar-benar menjadi ruang pembelajaran politik yang sehat bagi generasi masa depan bangsa.

C. PENUTUP

Kondisi di atas menunjukkan partisipasi pemilih pemula di Kota Bima dalam Pemilu Serentak 2024 telah menampakkan kemajuan dari sisi kuantitas kehadiran. Namun demikian, kualitas partisipasi masih menjadi tantangan besar.

¹⁶ Muhammad Syafii Sitorus dan Siti Hazar Sitorus, *Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.3, No.2 (2023).

¹⁷ Candra Taruna Irawan Lubis, *Penanaman Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Serentak 2024*, Jurnal Bakti Sosial, Vol.2, No.1 (2023).

Nabil Fajaruddin, Taufik Firmanto dan Aman Ma'ri
Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima

Dalam kajian ilmu politik dan pendidikan kewarganegaraan, hal ini mencerminkan kesenjangan antara partisipasi prosedural dengan partisipasi substantif, di mana pemilih hadir secara formal dalam bilik suara, namun belum memiliki pemahaman mendalam yang membentuk preferensi politik yang rasional dan berbasis nilai demokrasi. Fenomena ini menjadi alarm penting bagi penyelenggara pemilu, sekolah, dan masyarakat sipil di daerah seperti Kota Bima. Tanpa penguatan pendidikan politik yang sistemik, generasi muda berpotensi menjadikan pemilu sebagai ritual tanpa makna, dan memilih bukan karena orientasi perubahan, melainkan sekadar mengikuti arus atau euforia sesaat. Hal ini bertentangan dengan esensi demokrasi deliberatif yang menempatkan warga negara sebagai pelaku aktif dalam proses politik.

Sebagai bentuk intervensi, kolaborasi multipihak sangat dibutuhkan. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu perlu melakukan reorientasi dalam strategi sosialisasi yang lebih kontekstual dan berbasis pendekatan digital. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal harus lebih intensif mengintegrasikan literasi pemilu ke dalam pembelajaran PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler. Peran guru, orang tua, dan komunitas digital anak muda juga harus dioptimalkan sebagai jembatan literasi politik yang ramah terhadap gaya belajar generasi Z. Dengan pendekatan yang lebih menyentuh dimensi afektif, kognitif, dan partisipatif, maka pemilih pemula tidak hanya hadir di bilik suara, tetapi juga berperan sebagai warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam membangun demokrasi yang sehat di tingkat lokal maupun nasional. Kota Bima, sebagai bagian dari daerah yang mulai tumbuh kesadarannya dalam partisipasi politik generasi muda, memiliki potensi besar untuk menjadi model laboratorium demokrasi bagi wilayah lain di Indonesia Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Dantes, Komang Febrinayanti, I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Ni Putu Ega Parwati. *Sosialisasi dan Simulasi Partisipasi Pemilih Pemula di SMAN 2 Singaraja Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024*. Proceeding Senadimas Undiksha 1588 (2022).
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina dan Yuhana Erni Pertiwi. *Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital*. Jurnal Kajian Konstitusi. Vol.3. No.1 (2023).
- Kelibay, Ismed, Irwan Boinauw, Kamaluddin Kamaluddin, Muhammad Arifin Abdul Kadir dan Rosnani Rosnani. *Sosialisasi Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula (Siswa/Siswi SMA Kelas XII) di Kota Sorong pada Pemilu Serentak Tahun 2024*, Abdi Insani. Vol.10. No.2 (2023).
- Loho, Loho, Offeny Offeny dan Dotrimensi Dotrimensi. *Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Palangka Raya tentang Pentingnya Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Presiden 2024*. JPIPS. Vol.15 (2023).
- Lubis, Candra Taruna Irawan. *Penanaman Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Serentak 2024*. Jurnal Bakti Sosial. Vol.2. No.1 (2023).
- Mangngasing, Nasir, Dandan Haryono, Nuraisyah Nuraisyah, Nasrullah Nasrullah dan Niluh Indriani. *Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kecamatan Sarjo*. Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS). Vol.2. No.2 (2023).
- Muhtar, Saepudin, Ginung Pratidina, Yunita Sugiawan Putri, Novando Novando, Sarah Azhara, Panji Ivnan Saepullah, Mohamad Ardika, Aditya Ramadhan, Alya Siti Dwi Julia dan Ika Sartika. *Peran Penting Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024*. Devosi. Vol.4. No.2 (2023).
- Murfatihah, Siti dan Delly Maulana. *Kualitas Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024 di Kota Serang*. Moderat. Vol.11. No.2 (2025).
- Pratiwi, Nuning Indah, Ni Putu Dewi Rahayu dan Wahyu Indra Satria. *Sosialisasi Penggunaan Komunikasi Efektif untuk Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh*. BERNAS. Vol.5. No.2 (2024).
- Singarimbun, Junedi dan Ridwan Nasution. *Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Deliserdang*. Jurnal Riset Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2025).
- Sitorus, Muhammad Syafii dan Siti Hazar Sitorus. *Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3. No.2 (2023).
- Sudiksa, I Made, I Nyoman Sunarta, Gusi Putu Lestara Permana, Ketut Elly Sutrisni dan Kelvin Cahya Utomo. *Edukasi Penggunaan Media Sosial bagi Pemilih Pemula Sebagai Sarana Kampanye Pemilu Serentak 2024 di Desa Sumerta Kelod*. Sewagati. Vol.3. No.1 (2024).

Nabil Fajaruddin, Taufik Firmanto dan Aman Ma'ri
Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima

Syahuri, Taufiqurrohman, Syamsul Hadi dan Gilang Abi Zaifa. *Peningkatan Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula Pelajar SMAN 34 Jakarta pada Pemilu Serentak 2024*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa. Vol.6. No.2 (2023).

Wulandari, Riska dan Eko Setyadi Kurniawan. *Edukasi Bagi Pemilih Pemula Sebagai Upaya Partisipasi Masyarakat dalam Gelaran Pemilu Tahun 2024*. Jurnal Gerakan Mengabdikan Untuk Negeri. Vol.2. No.2 (2024).

Zulkarnain, Ariandi A, Ririn Septia, Robing Robing dan Irvan Ansyari. *Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Journal of Governance Innovation. Vol.5. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

Jaelani, Riyan. 2024. *Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Kalimantan: IPDN.

Praduta, Ananda Yayang dan Meltarini Meltarini. 2024. *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi. Kalimantan: IPDN.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.